



Jurnal Pendidikan IPS Indonesia is licensed under  
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **RELOKASI MASYARAKAT MADURA DI SINGKAWANG SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES RESOLUSI PASCA KONFLIK ETNISITAS DI KABUPATEN SAMBAS**

Wasis Suprpto

<sup>1)</sup> *STKIP Singkawang, Singkawang, Indonesia*  
E-mail: [wasissoeprpto@gmail.com](mailto:wasissoeprpto@gmail.com)

---

**Abstract.** Konflik etnisitas di Kabupaten Sambas telah menciderai semangat kebhinekaan di Indonesia. Konflik telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, dan membuat salah satu pihak harus direlokasi demi meredam konflik. Upaya relokasi ini pernah dialami oleh Etnis Madura di Kota Singkawang. Tujuan kajian ini yaitu (1) Pertimbangan dasar pemilihan Singkawang sebagai tempat relokasi ditinjau dari sisi keamanan dan politis, (2) Potensi Singkawang ditinjau dari sisi geografis dan ekonomis. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keamanan di Singkawang sangat terjamin karena banyak dijumpai markas TNI. Selain itu, Singkawang adalah daerah pemekaran baru dari Kabupaten Sambas sehingga memungkinkan terjadinya integrasi baru. (2) Tanah Singkawang sangat baik untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Hasil petanian sangat mendukung dalam memajukan perekonomian Singkawang. (3) Etnis Madura di Singkawang sudah mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara baik di bidang politik, pendidikan, dan budaya yang menjadi indikator sudah terjalannya integrasi antar etnis di kota ini.

Keywords: Relokasi, Resolusi, dan Singkawang

---

### I. INTRODUCTION

Keberagaman menjadi identitas yang begitu melekat pada struktur sosial masyarakat Indonesia. Sadar atau tidak bahwa sejatinya negara ini dibangun atas dasar perbedaan. Wujud perbedaan itu terlihat dari keragaman ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Kondisi masyarakat yang beragam tersebut tersebar di berbagai penjuru negeri. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bangsa yang berdiri di atas ragam perbedaan yang ada sudah sepantasnya dijunjung nilai-nilai persatuan bangsa.

Berbicara tentang persatuan tentu tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia yang saat itu dijajah oleh kolonialisme asing baik Belanda maupun Jepang terus berbenah menyiapkan segala daya dan upaya untuk merdeka. Uniknya, proses kemerdekaan yang dilakukan di galang dengan segala kekuatan termasuk melalui jalur pertempuran. Pertempuran ini sendiri dilakukan oleh beragam masyarakat nusantara dari berbagai latar belakang sosial yang melingkupinya. Semua elemen masyarakat bersatu padu untuk dapat berdaulat di tanah tumpahnya masing-masing.

Rasa persatuan sebagai sebuah entitas bangsa sebenarnya baru dimulai ketika peristiwa sumpah pemuda berlangsung. Peristiwa yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 tersebut

menjadi babak baru sejarah persatuan di nusantara. Peristiwa ini diikuti oleh ragam lapisan masyarakat tersebut berujung pada sebuah ikrar “sumpah pemuda” yang didalamnya memuat 3 poin yaitu (1) pengakuan terhadap tumpah darah yang satu tanah air Indonesia, (2) pengakuan atas bahasa yang satu bahasa Indonesia, dan (3) pengakuan sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga semangat ini menjadi semboyan sekaligus identitas khas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, semua elemen masyarakat harus menghargai semangat ini sebagai patokan hidup bermasyarakat.

Penghargaan atas ragam perbedaan sosial yang ada ditandai dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua ini seolah menjadi penegasan bahwa masyarakat Indonesia memang mampu hidup bersama di atas ragam perbedaan. Situasi ini pun dibuktikan dengan masih sentralnya peran pemuda pasca kemerdekaan. Peristiwa 21 Mei 1998 atau lebih dikenal dengan reformasi semakin menegaskan integritas ragam etnis di Indonesia. realita ini kembali mempertegas bahwa masyarakat Indonesia sudah makin dewasa menyikapi keragaman dalam bermasyarakat.

73 tahun pasca merdeka bagaimanakah dengan semangat kebhinekaan di Indonesia? Sadar atau tidak ternyata semakin bertambahnya umur semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan yang cukup menjadi catatan dalam konteks keragaman tentu tidak lepas

dari isu disintegritas. Disintegritas seolah menjadi bola panas ditengah semangat untuk terus memupuk rasa persatuan di negeri ini. Konflik horizontal seperti anarkisme, tawuran, serta konflik antar etnis jadi bumbu 72 tahun kemerdekaan Indonesia. Setiap daerah di Indonesia dapat terkena masalah ini termasuk didalamnya adalah Kalimantan.

Satu diantara beberapa propinsi yang cukup punya potensi besar terjadinya konflik etnitas adalah Kalimantan Barat. Data BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa 34.94% Etnis Dayak, 33.84% Melayu, 9.74 Jawa, 8.17 Tionghoa, 6.27% Madura, 3.13% Bugis, 0.60% Batak, 0.50% Dayak, 0.33% Banjar, dan 1.33% lainnya. kondisi ini tentu dapat memunculkan gesekan antar etnis. Gesekan itu di mulai pada periode 1962-1999 dimana telah terjadi 14 konflik etnis di Kalimantan Barat. Konflik antara Dayak dan Tionghoa terjadi 1 kali yaitu tahun 1967. Konflik antara Dayak dan Madura sebanyak 11 kali yaitu tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1994, 1996-1997. Konflik antara Melayu dan Madura 2 kali yaitu tahun 1998 dan 1999 (Zasco, 2011).

Rentetan konflik sosial masyarakat di kalimantan barat memperlihatkan bahwa telah terjadi disintegritas antar etnis. Disintegritas tersebut mengerucut pada kajian bahwa adanya permasalahan klasik antara penduduk asli dengan pendatang. Konflik horizontal terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat dapat dilihat dari frekuensi kejadian (FK), jumlah terbunuh (JNuh), jumlah terluka (Jka), rumah hancur (RH), bangunan publik hancur (BPH) seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Konflik Sosial Berdasarkan Wilayah

| Tempat         | FK | JNuh | Jka | RH   | BPH |
|----------------|----|------|-----|------|-----|
| Bengkayang     | 19 | 132  | 168 | 1572 | 1   |
| Kapuas Hulu    | 3  | 1    | 1   | 0    | 3   |
| Ketapang       | 2  | 0    | 4   | 0    | 1   |
| Kota Pontianak | 21 | 15   | 70  | 28   | 7   |
| Landak         | 4  | 455  | 265 | 789  | 3   |
| Pontianak      | 8  | 425  | 63  | 25   | 2   |
| Sambas         | 16 | 428  | 48  | 863  | 5   |
| Sangau         | 5  | 59   | 22  | 416  | 7   |
| Jumlah         | 78 | 1515 | 641 | 3693 | 29  |

Sumber: UNSFIR: 2004

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa hampir semua wilayah terkena konflik horizontal. Satu diantara beberapa daerah tersebut yang menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Sambas. Kemeranian pengkajian ini tidak lepas dari kebaruan konfliknya. Konflik di Sambas sendiri terjadi dari tahun 1998 sampai 1999. Konflik ini melibatkan dua etnis yaitu Melayu sebagai penduduk asli Kalimantan dengan Madura sebagai pendatang. Data dari UNSFIR tahun 2004 memperlihatkan bahwa frekuensi konflik di daerah ini sebanyak 16 kali dengan 428 orang meninggal, 48 luka-luka, 863 rumah hancur, dan 5 bangunan umum hancur. Data ini memberi gambaran telah terjadi konflik besar di daerah ini.

Pada perkembangannya konflik Sambas menyebabkan Etnis Madura harus direlokasi. Proses relokasi ini dilakukan karena memang situasi dan kondisi di Sambas sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh orang Madura. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah bertindak cepat untuk mencari tempat tinggal baru bagi orang Madura.

Uniknya, proses relokasi tersebut difokuskan di Singkawang ternyata saat itu masih berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Sambas. Mengacu pada kenyataan ini maka dalam pembahasan ini kajian akan berfokus pada tiga elemen dasar yaitu (1) Bagaimanakah sejarah terjadinya konflik etnis di Sambas? (2) Mengapa Singkawang menjadi daerah relokasi konflik bagi Etnis Madura? (3) Bagaimana perkembangan Etnis Madura di Singkawang saat ini?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini akan mencari data dari suatu variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002). Mengacu pada pendapat Arikunto tersebut terlihat bahwa semua dokumen yang didalamnya memiliki informasi relevan dapat digunakan untuk mendukung kajian dari suatu penelitian. Data pendukung tersebut pada dasarnya memiliki peranan yang besar untuk menentukan hasil dari suatu kajian.

Data yang bersumber dari dokumentasi selanjutnya dianalisis. Analisis ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang didalamnya berusaha mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis (Winarno, 1990). Analisis disini berupa kata-kata, gambar, serta angka meski penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Meleong (2000) menambahkan semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Kondisi ini terjadi karena satu dokumen dapat saling melengkapi atau mendukung satu sama lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sebab Konflik Sambas

Sebelum membahas secara detail tentang sebab konflik terlebih dulu akan dibahas tentang kategori konflik itu sendiri. Pengkategorian konflik ini perlu dilakukan agar memudahkan pengkajian suatu fenomena maupun data. Pada dasarnya konflik horizontal yang terjadi ditengah keragaman etnis yang ada di Indonesia di terbagi menjadi beberapa macam. Data dari *The United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR) tahun 2005 menjelaskan bahwa secara umum konflik di Kalimantan Barat dapat dikategorikan menjadi beberapa cakupan berikut:

Tabel 2. Kategori Konflik Sosial di Kalimantan Barat

| Kategori Konflik      | FK | JNuh | Jka | RH   | BPH |
|-----------------------|----|------|-----|------|-----|
| Hubungan Industrial   | 1  | 0    | 0   | 0    | 1   |
| Sumber Daya Alam      | 6  | 0    | 15  | 0    | 8   |
| Madura dan Dayak      | 19 | 1098 | 441 | 2724 | 6   |
| Madura dan Melayu     | 28 | 453  | 109 | 969  | 6   |
| Antar Aparatur Negara | 2  | 5    | 15  | 0    | 1   |
| Parpol dan Faksi      | 5  | 0    | 8   | 0    | 2   |

|                                     |    |      |     |      |    |
|-------------------------------------|----|------|-----|------|----|
| Perkelahian antar warga dan kampung | 7  | 1    | 10  | 0    | 0  |
| Negara dan Masyarakat               | 9  | 6    | 43  | 0    | 9  |
| Pengadilan Massa                    | 1  | 1    | 0   | 0    | 1  |
| Total                               | 78 | 1564 | 641 | 3693 | 34 |

Sumber: UNSFIR: 2004

Selama kurun waktu 1995-2003 konflik didominasi oleh *Ethno Communal* Etnis. Konflik terjadi sebanyak 78 kali dan 19 diantaranya melibatkan etnis Madura dan Dayak serta 28 kasus melibatkan Madura dan Melayu.

Mengacu pada tabel 2 di atas terlihat bahwa konflik horizontal terjadi karena adanya disintegrasi antar etnis. Fenomena ini terjadi dibanyak daerah khususnya di Kabupaten Sambas. Kabupaten ini memiliki wilayah yang sangat luas termasuk Sambas, Bengkang, dan Singkawang sebelum dimerkarkan jadi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Oleh sebab itu, pengkajian dalam konteks ini pun dilakukan secara utuh sesuai dangan cakupan wilayah Kabupaten Sambas.

Secara komprehensif Brown dikutip oleh Hermawan (2007: 78-79) menyatakan sebab utama terjadinya konflik internal yaitu:

Tabel 3. Sebab Konflik menurut Brown

| No | Sebab-Sebab Umum                                  | Sebab-Sebab Pemicu                               |
|----|---|--|
| 1. | Faktor Struktural                                 | Faktor Struktural                                |
|    | - Negara yang lemah                               | - Negara yang sedang runtuh                      |
|    | - Kekhawatiran tentang keamanan negara yang lemah | - Peribahan berimbangan kekuatan militer         |
|    | - Geografi etnis                                  | - Perubahan pola-pola demografis                 |
| 2. | Faktor Politik                                    | Faktor Politik                                   |
|    | - Lembaga politik yang deskriminatif              | - Transisi politik                               |
|    | - Ideology nasional yang eksklusif                | - Ideology eksklusif yang semakin berpengaruh    |
|    | - Politik antar kelompok                          | - Persaingan antar kelompok yang semakin tajam   |
|    | - Politik elit                                    | - Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam    |
| 3. | Faktor Ekonomi                                    | Faktor Ekonomi                                   |
|    | - Masalah ekonomi                                 | - Masalah ekonomi yang semakin parah             |
|    | - Sistem ekonomi yang deskriminatif               | - Ketipangan ekonomi yang semakin lebar          |
|    | - Pembangunan ekonomi dan modernisasi             | - Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat |
| 4. | Faktor Sosial Budaya                              | Faktor Sosial Budaya                             |
|    | - Pola deskriminasi budaya                        | - Pola deskriminasi budaya yang                  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Sejarah kelompok yang bermasalah | semakin kuat                      |
|                                    | - Penghinaan etnis dan propaganda |

Sumber: Michael E Brown (Hermawan, 2007: 78-79)

Mengacu pada tabel 3 di atas terlihat bahwa penyebab konflik dapat berangkat dari berbagai disiplin kajian. Konflik horizontal dapat terjadi karena faktor struktural, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat faktor ini sejatinya dapat diterapkan untuk mengkaji konflik di berbagai penjurur Indonesia.

Konflik horizontal yang terjadi di Sambas oleh Haryono & Winarno (2003, 678-687) dimotori karena kepentingan ekonomi. Konflik yang muncul dari aspek ini mencakup empat aspek berikut:

1. Perebutan Sumber Daya Ekonomi Pertanian

Program transmigrasi ternyata dapat merubah kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi pada Etnis Madura yang melakukan program transmigrasi ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Awal mula konflik bermula dengan adanya klaim tanah orang Melayu oleh orang Madura yang saat itu berstatus sebagai penggarap bukan pemilik. Data Pemda TK II Kabupaten Sambas (1999) menjelaskan luas tanah yang dimiliki oleh orang Madura mencapai 6.69,78 Ha. Ironisnya, sebagian besar tanah tersebut tidak memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT)

Tabel 4. Luas Lahan dan Statusnya per Kecamatan

| Kecamatan     | Luas     | Keterangan                            |
|---------------|----------|---------------------------------------|
| Selakau       | 297,85   | Banyak yang tidak jelas status haknya |
| Sanggau Ledo  | 293,35   | Jelas dan bersertifikat               |
| Sungai Raya   | 545,37   | Banyak yang tidak jelas status haknya |
| Jawai         | 888,57   | Jelas dan bersertifikat               |
| Teluk Keramat | 658,79   | Banyak yang tidak jelas status haknya |
| Paloh         | 92,29    | Banyak yang tidak jelas status haknya |
| Sambas        | 607,34   | Jelas dan bersertifikat               |
| Pemangkat     | 483,34   | Banyak yang tidak jelas status haknya |
| Tujuh Belas   | 152,11   | Jelas dan bersertifikat               |
| Sejangkung    | 1.219,41 | Tidak jelas statusnya                 |
| Roban         | 7,48     | Jelas dan bersertifikat               |
| Pasiran       | 1,58     | Jelas dan bersertifikat               |
| Samalantan    | 700,14   | Tidak jelas                           |
| Tebas         | 647,46   | Jelas dan bersertifikat               |
| Jumlah        | 6.694,78 |                                       |

Sumber: TK II Kabupaten Sambas 1999

2. Komoditi dalam Lapangan Usaha

Gelombang transmigrasi yang besar disadari atau tidak ikut membawa pengaruh bagi kondisi ekonomi warga setempat. Sejak orang Madura masuk pada bisnis transportasi terjadi banyak pergolakan. Pergolakan itu ditandai dengan adanya tindakan arogansi yang dilakukan oleh orang Madura. Gejala premanisme di jalan maupun di terminal angkutan dilakukan sebagai

bentuk intimidasi untuk mengeser dominasi orang Melayu pada sektor ini. Situasi ini membuat orang Melayu resah dan takut memasuki terminal.

### 3. Persaingan Sektor Formal

Persaingan ekonomi antara Etnis Madura dan Melayu benar-benar terasa di Kabupaten Sambas. Persaingan tersebut pun berlanjut khususnya pada sektor informal. Sektor ini yang dulunya dikuasai oleh orang Melayu mulai bergeser kepemilikannya mulai dari (1) calo penumpang di terminal bus dan pelabuhan, (2) tukang ojek, (3) jasa penyebrangan sungai, (4) buruh pelabuhan, (5) usaha pemecah batu dan bisnis tanah urug. Situasi seperti ini tentu lama-kelamaan akan menjadi bom waktu yang jika sampai meledak akan menimbulkan ekses yang luar biasa.

### 4. Kemerossotan Ekonomi Orang Melayu

Filosofi *kar-karkar colpe* seolah menjadi motivasi tersendiri bagi Etnis Madura dalam bekerja. Filosofi tersebut mempunyai arti bahwa orang Madura akan selaki berpikir layaknya seekor ayam yang akan terus menerus mencakar-cakar tanah untuk mencari makan meskipun sulit didapatkan. Filosofi ini tercemrin dari keuleran orang Madura dalam bekerja. Beragam jenis pekerjaan rela mereka lakukan demi membuat hidup mereka sejahtera. Orang Melayu pun mengakui keuletan orang Madura dalam bekerja.

Akar masalah pada kajian ini konflik muncul karena adanya tekanan horizontal. Tekanan ini adalah kompilasi dari tiga penyebab sebelumnya yaitu (1) masalah penguasaan tanah oleh orang Madura, (2) keberadaan orang Madura di Sambas menimbulkan masalah keamanan terbukti dari adanya tindak pencurian dan perampokan yang meresahkan orang Melayu, (3) persaingan lapangan kerja di sektor transportasi yang selama ini merupakan lahan usaha orang Melayu. Ketiga faktor ini ternyata berimbas pada makin merosotnya pendapatan orang Melayu.

Pendapat serupa sama juga diutarakan oleh Setiadi (2005: 37-40) bahwa konflik di Sambas terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda Madura dan ketidakmampuan aparat untuk mengatasi tindakan kriminal tersebut
2. Tekanan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk lokal karena masuknya pemilik modal besar dalam pengelolaan produksi jeruk dan hasil laut
3. Tekanan yang dirasakan oleh orang Melayu akibat membanjirnya migran Madura ke Sambas sehingga berakibat pada semakin menciutnya sumber ekonomi warga asli Sambas
4. Munculnya stereotipe sebagai masyarakat yang berkarakter kasar, arogan, keras, mudah tersinggung, dan mau menang sendiri. hal ini diperparah oleh kebiasaan orang madura yang selalu membawa *celurit* untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan.

Mengacu pada pendapat Brown, Haryono & Winarno, dan Setiadi dapat disimpulkan bahwa konflik di Sambas terjadi karena faktor ekonomi dan sosial

budaya. Faktor ekonomi terlihat dari adanya perebutan sumber daya ekonomi, komoditi lapangan usaha, persaingan sektor formal, dan kemerossotan ekonomi penduduk lokal. Faktor sosial budaya terjadi karena adanya gelombang migrasi orang Madura, meningkatnya angka kriminalitas, dan kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan khususnya dengan menggunakan *celurit*. Dua faktor ini punya keterkaitan Melayu satu sama lain.

### B. Mengapa Singkawang?

Resolusi konflik jadi sebuah solusi untuk mencegah makin meluasnya dampak yang ditimbulkan akibat konflik itu sendiri. Rozi (2006) menjelaskan 4 tahap resolusi konflik yaitu tahap deeskalasi konflik, negosiasi, *problem solving approach*, dan *peace building*. Deeskalasi menekankan penghentian kekerasan melalui bantuan militer. Negosiasi lebih berorientasi pada melibatkan pihak-pihak yang terlibat konflik. *Problem solving approach* bertujuan mencari pokok masalah untuk kemudian diselesaikan secara damai. *Peace building* bersifat kultural dan struktural yang memerlukan waktu panjang dan konsisten untuk mewujudkan perdamaian. Pada dasarnya keempat proses ini sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik horizontal di Sambas. Berdasarkan hasil kajian seperti pada tabel 3 di bawah ini terlihat keengganan dari orang Melayu untuk hidup membaaur dengan orang Madura.

Disintegrasi yang terjadi di Kabupaten Sambas tentu harus dicermati secara bijak. Ketidakmauan membaaur dengan orang Madura jadi sebuah sinyal yang kuat kemungkinan terulangnya konflik jika kedua etnis ini dipaksakan untuk hidup bersama. Galtung (2011) mengamini perlunya pendekatan resolusi konflik agar masalah serupa tidak terjadi melalui tiga pendekatan yaitu *peace keeping*, *peace building*, dan *peace making*. *Peace keeping* dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan atau militer. *Peace building* dengan melakukan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Adapun *peace making* melalui proses negosiasi antara kelompok yang berbeda pandangan dan kepentingan. Konflik komunal di Sambas telah melalui tiga proses ini dan inti dari proses ini adalah keengganan untuk kembali membaaur. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain selain melakukan relokasi demi menciptakan *peace building*.

Sebelum mengkaji peran strategis Singkawang sebagai *peace building* terlebih dahulu perlu dikaji model resolusi konflik yang telah dilakukan. Pada kajian ini akan dikomparasikan dua model resolusi konflik di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Tengah. Komparasi penanganan konflik tersebut dapat diutarakan oleh Cahyono (2014: 76) berikut ini:

Tabel 5. Resolusi Konflik di Kalbar dan Kalteng

|  | Sambas (Kalimantan Barat)   | Sampit (Kalimantan Tengah)   |
|--|---|--|
| Data konflik                           | ✓ Korban tewas 200 orang jumlah pengungsi 30.000  | ✓ Korban tewas 400 orang jumlah pengungsi 30.000   |
| 1. Kondisi pascakonflik                | ✓ Lokasi pengungsian di Kalbar  | ✓ Lokasi pengungsian di Kalteng  |
| 2. Peran negara                        | ✓ Orang Madura ditolak masuk Sambas   | ✓ Orang Madura sudah kembali secara bertahap   |
|  | ✓ Tahap de-eskalasi   | ✓ Tahap de-eskalasi  |
|  | Aparat keamanan terlambat mencegah penyebaran konflik   | Aparat keamanan terlambat mencegah penyebaran konflik  |
|  | ✓ Tahap Intervensi kemanusiaan  | ✓ Tahap Intervensi kemanusiaan   |
|  | Penampung pengungsi menjadi proyek provinsi Kalbar tanpa melibatkan Kabupaten Sambas  | - Penampung penumpang sebagian besar di Jawa Timur,<br>- Pemerintah pusat menyediakan Kapal untuk mengangkut para pengungsi                                |
|  | ✓ Tahap negosiasi politik   | ✓ Tahap negosiasi politik  |
|  | Tidak banyak peranannya kalau pun ada difasilitasi oleh Pemprov dan Polda   | - Adanya dukungan nasional lewat pertemuan di Jakarta, Jogja, Malang, dan Bangkalan<br>- Banyak yang lari ke Madura sehingga Pemda Jatim merasa keberatan  |
| 3. Peran masyarakat                    | ✓ Kelompok pendorong resolusi konflik memiliki jaringan lemah dan kuat dikalangan pengungsi Madura saja                               | ✓ Kelompok pendorong resolusi konflik memainkan peran yang menonjol, disamping peran institusi keagamaan (FPMPU) yang didukung oleh Madura dan Dayak Islam |
|  | ✓ Peran NGO: parsial dan rebutan kavling  | ✓ Peran NGO: ada kerjasama   |
|  | ✓ Pengembalian pengungsi lebih banyak di kota   | ✓ Pengembalian pengungsi: lebih banyak di desa-desa  |
| 4. Dinamika hubungan masyarakat-negara | ✓ Pascakonflik: lingkup kabupaten   | ✓ Pascakonflik: lingkup propinsi   |
|  | ✓ Kekuatan politik lebih homogen: (i) membangun tembok Sambas, (ii) Keraton tulang punggung penolak kembalinya orang Madura ke Sambas | ✓ Kekuatan politik heterogen dan peran demang dalam menyeleksi kembalinya orang Madura   |
|  | ✓ Pemekaran wilayah untuk mengakomodasi kepentingan elite dan masyarakat serta pembagian kekuasaan antar etnik                        | ✓ Pemekaran wilayah membuat banyak elit yang tertampung dalam struktur pemerintahan. Isu pemekaran menyebabkan Dayak tidak berfokus menolak Madura         |

Sumber: Cahyono (2014: 76)

Mengacu pada tabel 5 di atas terlihat bahwa ada banyak perbedaan yang terjadi dalam proses resolusi konflik. Perbedaan yang paling mencolok terdapat pada poin 5 yaitu tentang dinamika hubungan masyarakat dan negara. Pada poin ini terlihat ada disparitas penanganan konflik antara Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat menolak masuknya kembali orang Madura. Sedangkan di Kalimantan Tengah orang Madura boleh masuk tapi lewat seleksi demang.

Singkawang memiliki potensi yang besar untuk dijadikan *peace building*. Resolusi konflik model ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek berikut ini:

### 1. Keamanan

Aspek ketahanan jadi salah satu unsur utama terciptanya kehidupan masyarakat yang penuh harmonis. Situasi ini sangat terasa jika berkunjung ke salah satu daerah di Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Sejak pertama kali masuk di Kota ini

akan disambut oleh markas tentara. Pemandangan serupa pun akan ditemui ketika masuk di dalam kotanya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis diketahui ada beberapa markas tentara di Singkawang seperti terlihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Daftar Markas Tentara

| No | Nama                   | Alamat                                  |
|----|------------------------|---|
| 1  | Rindam                 | Jl. Pontianak Singkawang, Sedau Singdel |
| 2  | Brigif 19 Khatulistiwa | Jl. Veteran Roban Singkawang Tengah     |
| 3  | Makodim 1202           | Tarakan Singkawang                      |
| 4  | Kodim 1202             | Jl. S.M. Tsjafioeddin Singkawang        |
| 5  | Koramil 1202-11        | Jl. Diponegoro Singkawang Tengah        |

Sumber: Hasil observasi (2017)

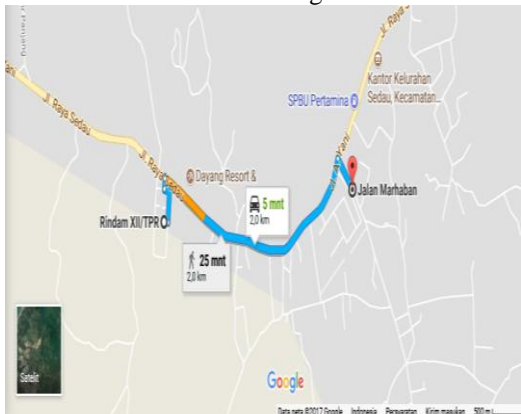
Mengacu pada tabel 6 di atas terlihat bahwa ada 8 total jumlah markas tentara di Singkawang. Uniknya luas wilayah Kota Singkawang lebih kecil

dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan Barat. Sebenarnya banyaknya markas tentara di Singkawang sangat berkaitan proses resolusi konflik pasca konflik etnisitas di Kabupaten Sambas. Korban konflik Sambas umumnya di relokasi di Pontianak yaitu GOR Pangsuma, Gor Untan, dan Asrama Haji Pontianak dan Barak Marhaban di Singkawang.

Pada perkembangannya daerah yang menjadi pusat pemukiman orang Madura bertambah. Saat relokasi dilakukan orang Marhaban ditempatkan di daerah Marhaban Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan. Selain itu ada daerah lain yang sekarang menjadi pusat pemukiman orang Madura yaitu di Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah. Dua tempat aman ditinggali oleh orang Madura karena berdekatan langsung dengan Markas tentara seperti gambar berikut:



Gambar 1. Brigif 19



Gambar 2. Rindam

## 2. Mosial masyarakatnya

Singkawang merupakan salah satu daerah multikultural di Indonesia. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari konteks agama yang dianut oleh penduduknya. Berdasarkan data Singkawang dalam angka tahun 2007 didapatlah fakta sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Agama di Singkawang

| Kec    | Jumlah Penduduk Beragama |         |           |       |        |
|--------|--------------------------|---------|-----------|-------|--------|
|        | Islam                    | Katolik | Protestan | Hindu | Budha  |
| Tengah | 25.941                   | 3.384   | 4.657     | 5     | 18.631 |
| Timur  | 4.592                    | 6.334   | 2.743     | 5     | 3.905  |

|         |        |        |        |     |        |
|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| Barat   | 17.722 | 3.724  | 2.346  | 42  | 30.403 |
| Utara   | 16.821 | 79     | 138    | 4   | 3.652  |
| Selatan | 10.910 | 3.341  | 2.586  | 300 | 22.077 |
| Total   | 75.986 | 16.862 | 12.470 | 356 | 78.668 |

Sumber: Singkawang dalam Angka 2007

Mengacu pada tabel 7 di atas terlihat bahwa semua agama dapat tumbuh di Kota Singkawang. Setiap pemeluk agama di kota ini hidup berdampingan dan rukun satu sama lainnya. Hal ini yang menyebabkan Singkawang cocok menjadi alasan tinggal semua etnis termasuk didalamnya termasuk Madura.

## 3. Geografis

Faktor geografis akan sangat turut berimbas pada kehidupan umat manusia di diberbagai belahan dunia termasuk didalamnya Singkawang. Singkawang adalah kota yang ternyata memiliki potensi yang unggul. Keunggulan tersebut dapat di lihat dari unsur-unsur geografis wilayahnya. Satu unsur itu misalnya adalah kondisi tanah. Tanah akan sangat berpengaruh bagi corak kehidupan warga setiap daerah. Tanah disadari atau tidak akan mempengaruhi kesejahteraan warga. Data dari Singkawang dalam angka tahun 2016 diketahui bahwa jenis tanah yang ada di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jenis Tanah di Singkawang Tahun 2015

| Kec     | Jenis Tanah |        |        |       |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|-------|
|         | Org         | Alu    | Ped    | Lat   | PMK   |
| Selatan | 1.052       | 11.784 | 2.880  | 2.988 | 3.744 |
| Timur   | 2.200       | 3.926  | 10.500 | 0     | 0     |
| Utara   | 500         | 6.165  | 0      | 0     | 0     |
| Barat   | 0           | 904    | 600    | 0     | 0     |
| Tengah  | 0           | 2.559  | 296    | 0     | 302   |
|         | 3.752       | 25.338 | 14.276 | 2.988 | 4.046 |

Sumber: Singkawang dalam Angka (2016: 10)

Mengacu tabel 8 di atas terlihat semua jenis tanah tersebut memiliki dampak yang baik bagi sektor pertanian. Pertanian di daerah ini berkembang cukup pesat. Data Dinas Pertanian Kota Singkawang tahun 2011 misalnya menyebutkan data sebagai berikut:

Tabel 10. Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2011

| Jenis sayur    | Luas tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produk si (Ton) | Rata-rata Panen Per Ha (Ton) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Sawi           | 559             | 544             | 8899,7          | 16,36                        |
| Lobak          | 47              | 32              | 182,1           | 5,69                         |
| Kacang Panjang | 145             | 92              | 265,2           | 2,88                         |
| Cabe Besar     | 49              | 24              | 495             | 20,63                        |
| Cabe Rawit     | 126             | 77              | 214,7           | 2,79                         |
| Tomat          | 23              | 23              | 97,8            | 4,25                         |
| Terung         | 51              | 23              | 54,5            | 2,37                         |
| Ketimun        | 124             | 96              | 405             | 4,22                         |
| Labu Siam      | 3               | 4               | 6,3             | 1,58                         |
| Kangkung       | 60              | 56              | 268,3           | 4,79                         |
| Bayam          | 61              | 61              | 207,4           | 3,40                         |

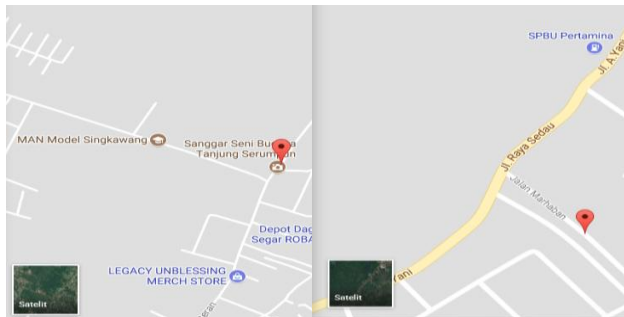
Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Singkawang

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa banyak sekali komoditas sayur yang didapatkan dari bumi Singkawang. Kondisi ini terlihat dari rata-rata panen tiap tahunnya. Panen terbanyak dari hasil pertanian adalah cabe besar yang mencapai 20,63 ton di tahun 2011. Di posisi kedua ada sawi yang mencapai 16,36 ton. Hal ini juga ditunjang oleh hasil sayur lain yang juga melimpah. Komoditas sayuran seperti lobak, tomat, kangkung, ketimun, bayam, dan lainnya turut andil meramaikan hasil pertanian.

4. Ekonomis

Kondisi geografis akan turut berpengaruh pada sektor ekonomi. Tanah di Singkawang umumnya sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Dalam konteks ini penulis melihat bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang digeluti oleh warga Singkawang khususnya oleh Etnis Madura. Hal ini dikarenakan keahlian orang Madura dulunya adalah bekerja di sektor ini.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya Etnis Madura Singkawang ada di dua daerah yaitu di Marhaban dan Roban. Dua daerah ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Jl Veteran Roban

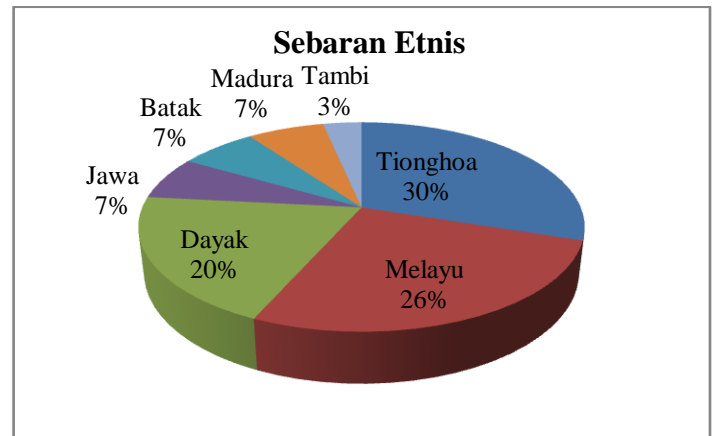
Gambar 4. Jl Marhaban

Mata pencaharian dua daerah ini rata-rata sama yaitu menjadi sebagai seorang pertanian. Pertanian memberikan kemakmuran tersendiri bagi para warga di sana. Aneka sayuran dihasilkan oleh warga di daerah ini seperti terlihat pada tabel 5 di atas.

C. Etnis Madura saat ini

1. Politik

Sejak awal berdirinya kontestasi perpolitikan di Singkawang sangat seru untuk disimak. Kondisi ini terjadi karena perpolitikan di Singkawang telah mencerminkan identitas. Identitas di Kota 1000 Klenteng ini bersifat entitas etnis. Suprpto (2017) menjelaskan anggota DPRD Kota Singkawang tahun 2009 beraneka ragam. Keragaman itu bersifat entis dimana 9 orang atau 30% Tionghoa, 8 orang atau 27% Melayu, 6 orang atau 20% Dayak, dan 2 orang atau 7% adalah Batak, Jawa, dan Madura, serta 1 orang atau 3% Tambi seperti gambar dibawah ini



Gambar 5. Distribusi Etnis Anggota DPRD Singkawang tahun 2009

Konstelasi politik di ranah DPRD Singkawang pun dapat dimaknai sebagai bentuk keragaman dari sisi kepercayaan. Kota Singkawang yang juga di kenal sebagai kota 1000 Klenteng ini sangat kental dengan nuansa Tionghoa. Tionghoa di kota ini direpresentasikan sebagai pemeluk agama Budha, Melayu dan Madura pemeluk Islam, serta Dayak yang beragama Kristen maupun Katolik. Keragaman di Singkawang mencerminkan bahwa setiap orang memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan.

Berbicara tentang pemerintahan tentu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari keberadaan Etnis Madura. Etnis yang direlokasi pasca konflik di Kabupaten Sambas ini ternyata turut terlibat dalam bidang pemerintahan. Tiga Anggota DPRD tahun 2009 berasal dari Etnis Tionghoa. Hal ini berjalan lurus dengan pemimpin di daerah multi etnis ini dimana pernah dipimpin oleh orang Madura. Madura pernah berjaya pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota tahun 2012. Awang Ishak sebagai orang Melayu berpasangan dengan Abdul Mutholib yang merupakan orang Madura.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah motor penggerak kemajuan manusia era modern ini. Sadar atau tidak bahwa perkembangan zaman sangat ditentukan oleh aspek yang satu ini. Negara hebat di dunia seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan Singapura meletakkan pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan peradaban manusianya. Hal inilah yang mendorong banyak negara di dunia termasuk Indonesia untuk bergerak bersama mencerdaskan rakyatnya.

Berbicara soal pendidikan tentu tidak dapat lepas dari produk undang- undang misalnya Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur soal pendidikan. Pada pasal ini dijelaskan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” seperti terdapat pada Pasal 31 ayat 1. Pasal ini harus dimaknai secara global yaitu tidak membedakan seseorang atas dasar ras, etnis, agama, bahasadan latar belakang sosial yang melingkupinya. Oleh sebab itu, etnis madura pun diberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.



Etnis Madura di Singkawang sejatinya turut terlihat aktif dalam ranah pendidikan. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada 31 April 2017 diketahui orang Madura Singkawang terlibat dalam usaha untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia. Kondisi ini diketahui dengan dibangunnya beberapa sekolah sebagai media pendidikan di Singkawang. MTs Makarim El Ahklaq yang terletak di Jalan Melati No. 22 Singkawang Tengah dan MTs Ibnu Taimiya di Jalan Malindo Sedau Singkawang Selatan adalah bukti keikutsertaan etnis Madura dalam ranah pendidikan. Sekolah ini ternyata terbuka untuk semua orang meskipun bukan berasal dari Etnis Madura.

### 3. Budaya

Indonesia adalah salah negara yang unik. Keunikan tersebut terlihat dari corak keragaman masyarakatnya. Setiap daerah di negeri ini memiliki kekhasannya masing-masing termasuk jika dikaitkan dengan etnisitasnya. Seperti Kota Singkawang Kalimantan Barat yang dihuni oleh beragam etnis. Kondisi ini tentu mengakibatkan daerah ini memiliki khasanah budaya yang khas pada masing-masing etnis. Satu diantara beberapa etnis di Singkawang tersebut adalah Madura.

Madura adalah etnis datangan yang ada di Singkawang. Meskipun demikian, nyata tradisi lokal masih terus dilestarikan hingga saat ini. Hal ini terlihat dari masih dilaksanakannya tradisi Karapan Sapi yang begitu ikonik atau identik dengan etnis Madura. Setiap tahunnya tradisi ini selalu dibuat untuk melestarikan dan menjaga kesenian tersebut dari kepunahan. Berikut adalah contoh perayaan yang dilaksanakan di Singkawang



Gambar 6. Joki Anak

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari kajian artikel di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik horizontal di Sambas terjadi karena dua faktor yaitu ekonomi dan sosial budaya. Faktor ekonomi terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi, komoditi lapangan usaha, persaingan sektor formal, dan kemerosotan ekonomi penduduk lokal. Faktor sosial budaya terjadi karena gelombang migrasi orang Madura, meningkatnya angka kriminalitas, serta kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan khususnya dengan menggunakan celurit.
2. Relokasi dilakukan di Singkawang karena keamanan warga Madura di kota ini terjamin, semua etnis dapat hidup berdampingan satu sama lain, kondisi tanah di kota

ini mendukung untuk kegiatan pertanian, dan warga disini mendapatkan hak ekonomi

3. Kehidupan orang Madura di Singkawang saat ini baik. Hak-hak dalam bidang politik, pendidikan, dan budaya menjadi indikator sudah terjadinya integrasi antar etnis di kota ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Statistik Daerah Kota Singkawang 2016*. Singkawang
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kota Singkawang dalam Angka 2008*. Singkawang: BPS Kota Singkawang.
- Cahyono, Heru. 2004. *Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*. Jakarta : Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Haryono, Dwi., Budi Winarno. 2003. Faktor-Faktor Struktural yang Menyebabkan Timbulnya Konflik antara Etnik Melayu dengan Etnik Madura di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Sosiohumanika* Vol 16 No. 3, September 2003
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung
- Pemerintah Kota Singkawang. 2011. *Database Singkawang 2011*. (<http://www.singkawangkota.go.id/> diakses pada hari 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB)
- Rozy, Syafuan dkk. 2006. *Kekerasan komunal: Anantomi dan resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Setiadi. 2005. *Korban Menjadi Korban: Perempuan Madura Pascakonflik Sambas*. Yogyakarta: (Seri Laporan No 161) PSKK UGM dan Ford Foundation) hal. 37-40
- Suprpto, W. 2017. Kontestasi Etnis Di Kancanah Politik. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8 No. 2
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Tentang Hak Asasi Untuk Mendapat Pendidikan.
- UNSFIR, 2004. *Indonesian Collective Violence Database 2004*. Jakarta: United Nation Development Program.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Zasco, Amrazi. 2011. Esensi Nilai Pendidikan Bagi Daerah Rawan konflik Kalimantan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Vol 2 No 2 Oktober 2011